



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : DINAS KETENAGAKERJAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANI MUFAIDAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 148934

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.200.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 725.000.000
5. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 85.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 162.500.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 970.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 3.418.000.000

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 3.418.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.